



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG EKONOMI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LEONARDO ADYURNAMA ALIAS TEGUH SAMBODO
2. Jabatan : DIREKTUR INDUSTRI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3. NHK : 401494

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.529.955.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 540.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 490.680.000
3. Tanah Seluas 589 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 106.255.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 23.6 m2/23.6 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 392.920.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ---

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 51.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 10.363.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 522.663.518

F. HARTA LAINNYA Rp. 465.219.800

Sub Total Rp. 2.579.501.318

III. HUTANG Rp. 223.244.418

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.356.256.900

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.